LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

PERIODE OKTOBER-DESEMBER
TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
DI PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Disahkan di Palangka Raya
Pada Hari Selasa, 2 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

SUJATMIKO, S.H., M.H.
NIP. 19600812 198612 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei ini merupakan kelanjutan implementasi perbaikan dari penilaian masyarakat pada survei periode sebelumnya, dan di dalam pelaksanaan survei dan laporan survei ini tentu masih perlu perbaikan- perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, 2 Januari 2024

Tim Survei

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud Dan Tujuan 2
1.3. Landasan Hukum 2
1.4. Rencana Kerja 3
BAB II 5
METODOLOGI 5
2.1. Metode Penelitian 5
2.2. Populasi Dan Sampel 5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control 6
2.5. Teknik Analisis Data 6
2.6. Tahapan pelaksanaan 7
BAB III 9
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI 9
3.1. Profil responden 9
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator 14
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya 29
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya 30
BAB IV 32
PENUTUP 32
4.1. Kesimpulan 32
4.2. Rekomendasi 32

DAFTAR TABEL

No. Tabel

Halaman

1. Model Alur Penyusunan Survei SPAK Menuju Zona Integritas 7
2. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi 8
3. Nilai Persepsi 8
4. Tingkat Pendidikan Responden 9
5. Jenis Pekerjaan Responden 10
6. Domisili Responden 12
7. Usia Responden 13
8. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan 15
9. Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan 16
10. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh 17
11. Indeks Pada Indikator Pada Transaksi Biaya 19
12. Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan 20
13. Indeks Pada Indikator Hadiah 22
14. Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya 23
15. Indeks Pada Indikator Percaloan 25
16. Indeks Pada indikator Perbuatan Curang 26
17. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia 28
18. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada PT P. Raya 29
19. Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada PT P. Raya 31
20. Isian Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satker PT. P.Raya 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bersih dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menjadi menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas

penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

g) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

  Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  a. Kuesioner.
  b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  a. Jumlah Responden.
  b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

  Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang

mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II
METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka atau secara online. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 31 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya). Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan

yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. ***Kedua***, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala Indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei SPAK menuju Zona Integritas

Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya mayoritas dengan latar Pendidikan S1 yaitu sebanyak 27 responden atau 61% dari total 44 responden.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
1	Tidak/Belum Sekolah	0	0%
2	SD	0	0%
3	SMP	0	0%
4	SMU	6	14%
5	DIPLOMA 1	0	0%
6	DIPLOMA 2	0	0%
7	DIPLOMA 3	3	7%
8	S1	27	61%
9	S2	8	18%

10	S3	0	0%
Jumlah		**44**	**100%**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

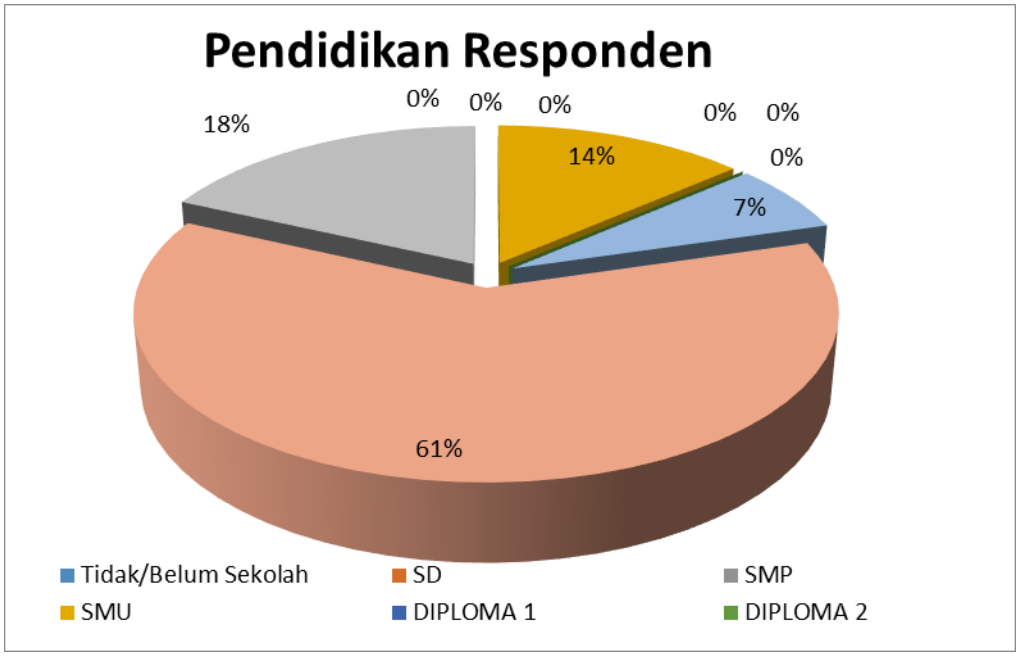

Jawaban Responden

Gambar 3.1.1

Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya

Tingkat Pendidikan Terakhir

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 93% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya memiliki pekerjaan PNS yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) responden.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Prosentase
1	PNS	41	93.18
2	TNI	0	0
3	POLRI	0	0
4	SWASTA	0	0
5	WIRAUSAHA	0	0
6	TENAGA KONTRAK	3	6.82
7	LAINNYA	0	0.00
Jumlah		**44**	**100.00**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

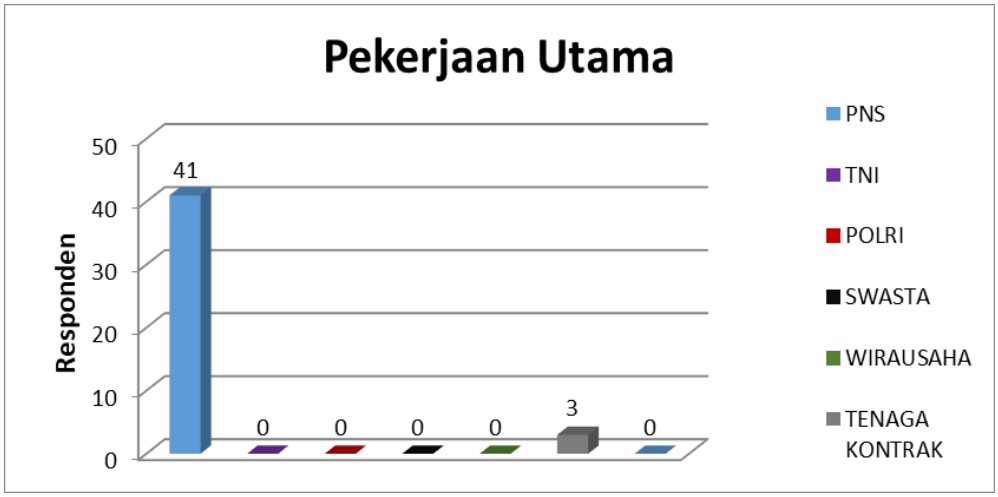

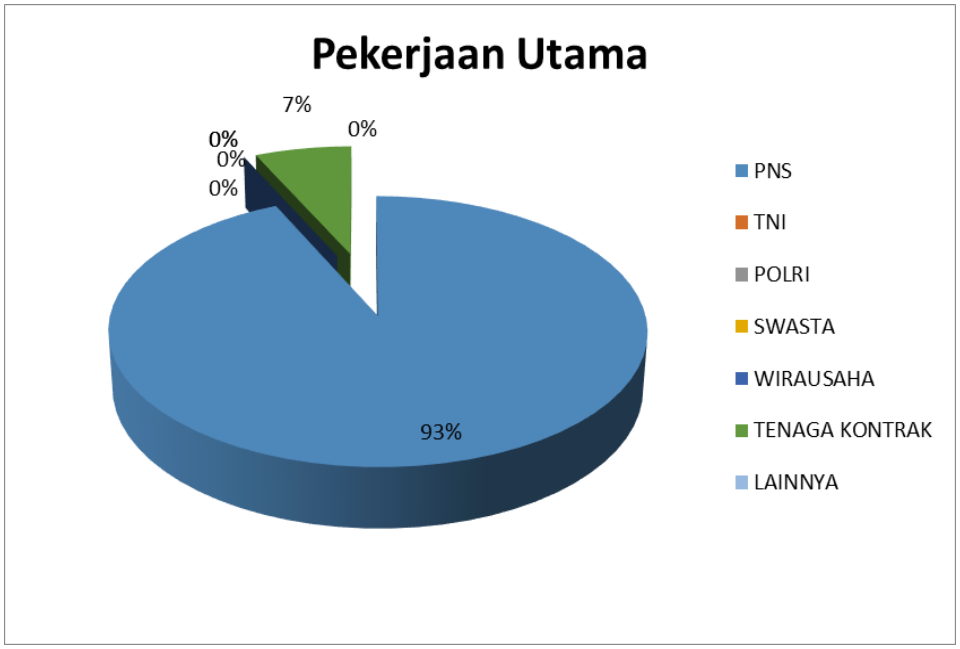

Gambar 3.1.2
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Tingkat Pekerjaan

3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domilisi, responden paling banyak berasal dari Kalimantan Tengah yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) responden dengan prosentase 100%.

Tabel 6

Domisili Responden

No	Domisili Responden	Frekuensi	Prosentase
1	DKI Jakarta	0	0%
2	Jawa Timur	0	0%
3	Kalimantan Tengah	44	100%
Jumlah		**44**	**100%**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat

disajikan dalam grafis berikut ini:

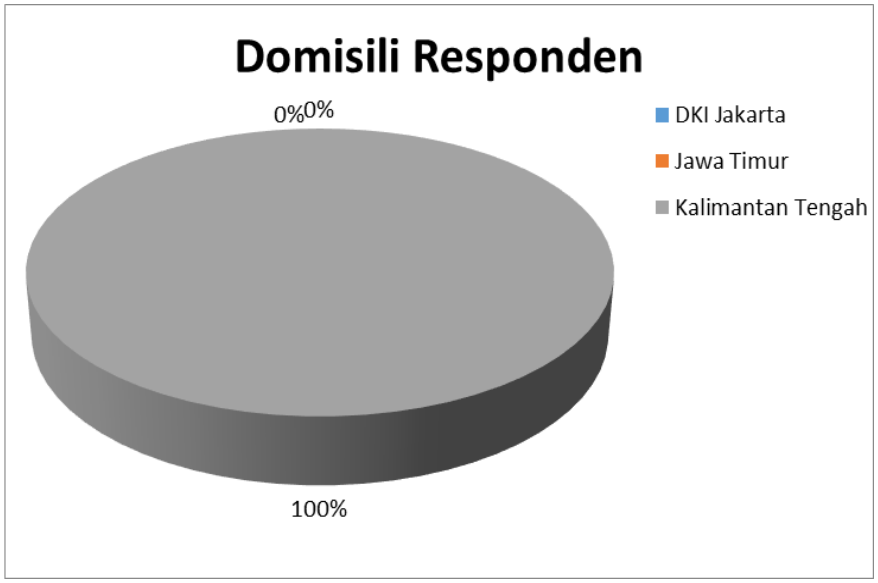

Gambar 3.1.3
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Domisili

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu dengan jumlah yang sama pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun yakni sebanyak 22 (dua puluh dua) responden.

Tabel 7.

Usia responden

No	Usia Responden	Frekuensi	Prosentase
1	18 - 28 Th	6	13.64%
2	29 - 39 Th	22	50.00%
3	40 - 49 Th	11	25.00%

4	50 - 59 Th	5	11.36%
5	60 - 69 Th	0	0.00%
Jumlah		**44**	**100%**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:

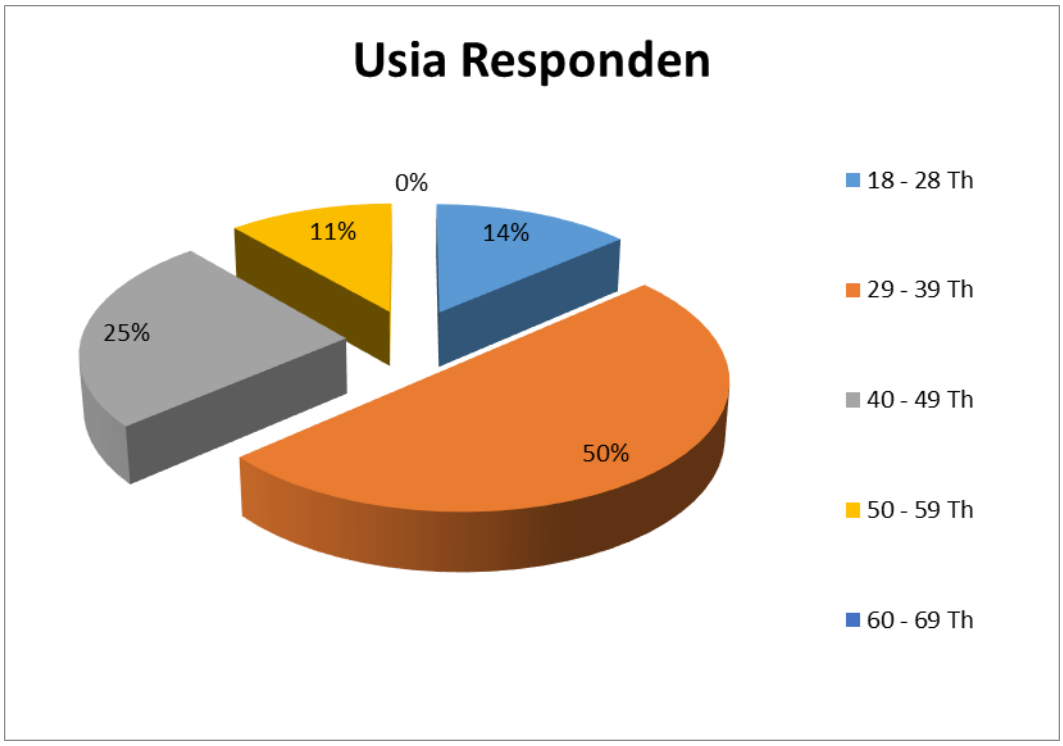

Gambar 3.1.4
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Usia Responden

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indicator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada interval indeks 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari

Korupsi dan terlihat pada tabel 8.

Tabel 8.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	4.00
2	1.76-2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	44	176	100.00%	
Jumlah			44	176	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:

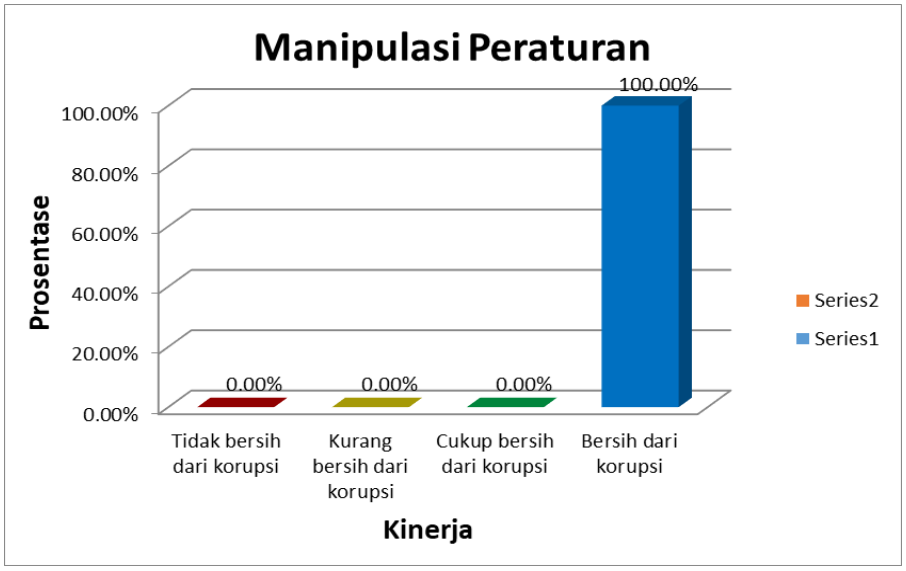

Gambar 3.2.1
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Manipulasi Peraturan

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,93.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari Korupsi.

Tabel 9.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.93
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	3	9	6.82%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	41	164	93.18%	
Jumlah			44	173	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:

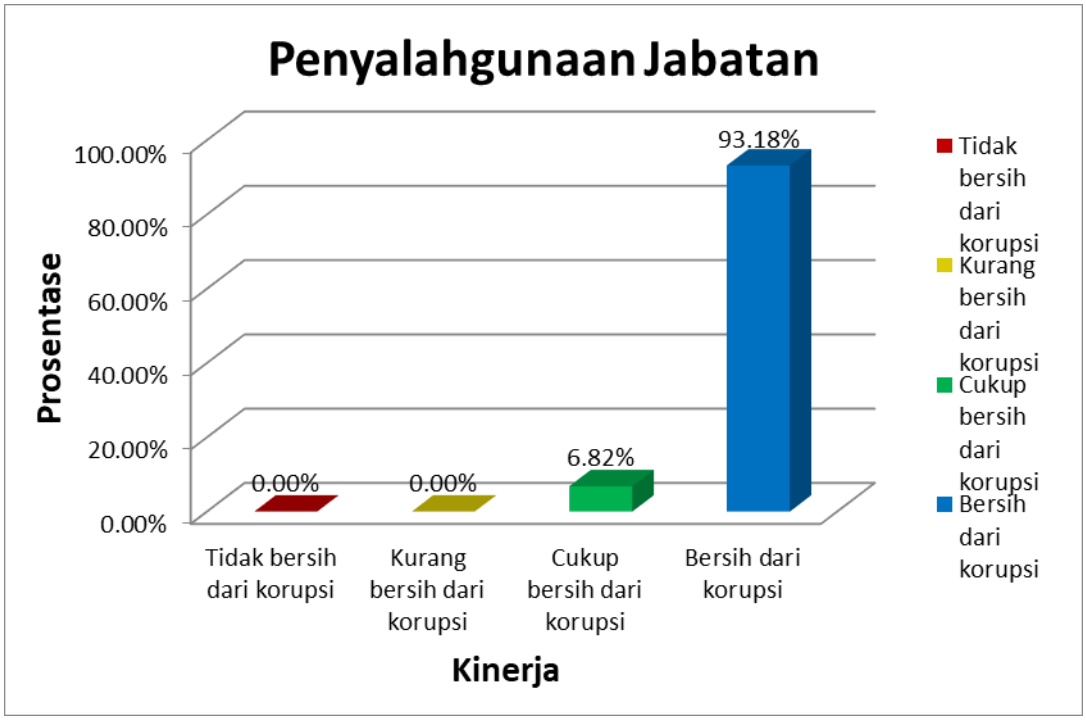

Gambar 3.2.2
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Penyalahgunaan Jabatan

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

Tabel 10.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.91

2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	4	12	9.09%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	40	160	90.91%	
Jumlah			44	172	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:

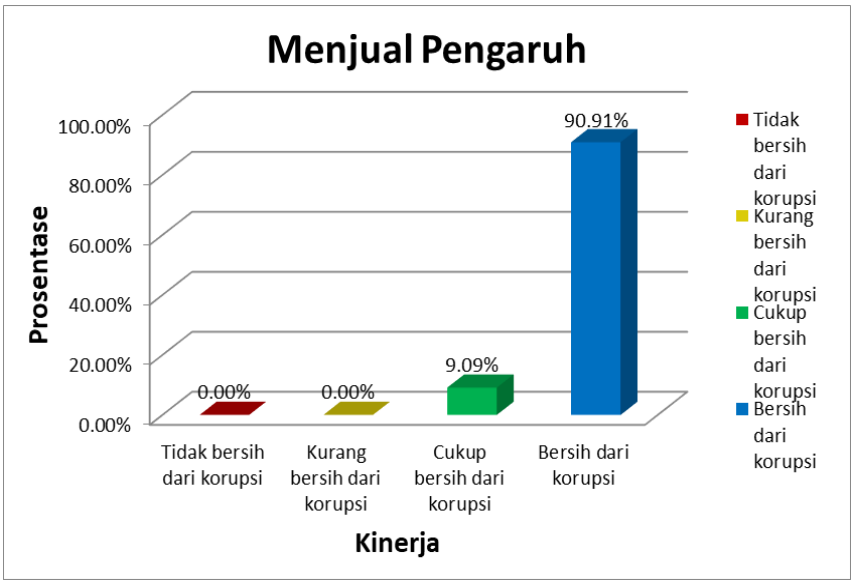

Gambar 3.2.3
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Menjual Pengaruh

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,82.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

Tabel 11.

Indeks pada indikator transaksi biaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.82
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	8	24	18.18%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	36	144	81.82%	
Jumlah			44	168	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:

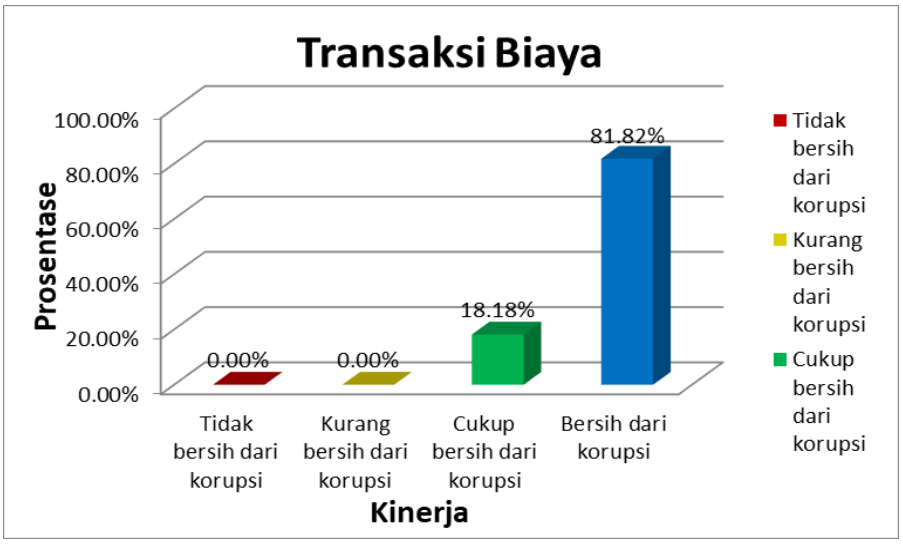

Gambar 3.2.4
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Transaksi Biaya

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,84.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator biaya tambahan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	1	1	2.27%	3.84
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	4	12	9.09%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	39	156	88.64%	
Jumlah			44	169	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:

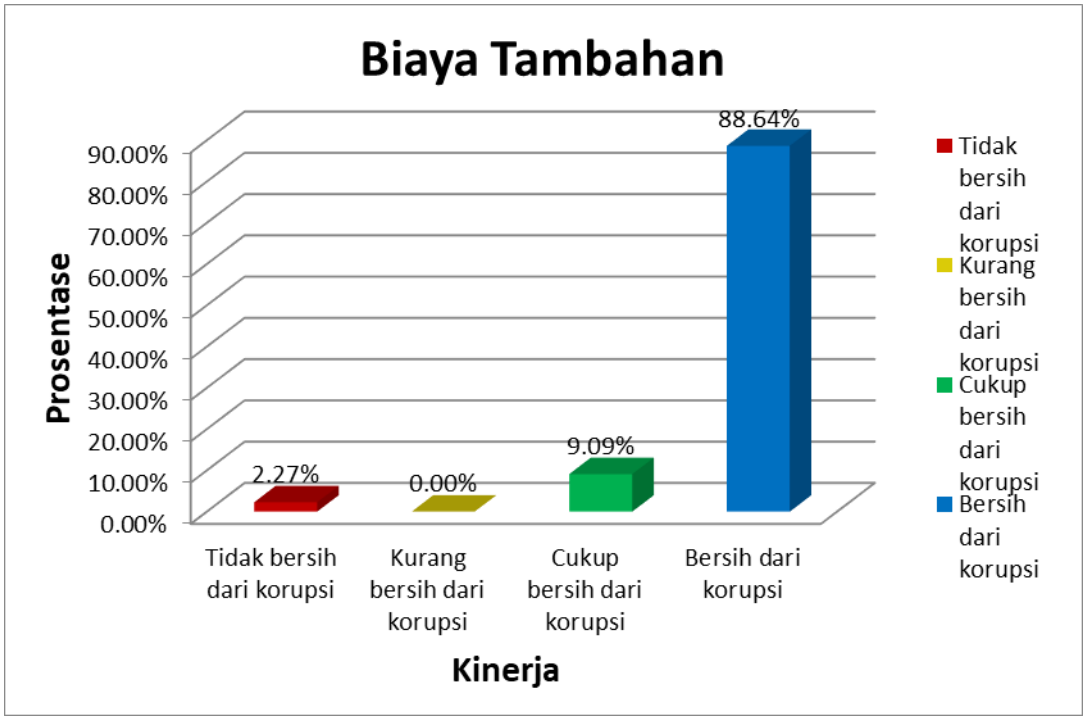

Gambar 3.2.5
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Biaya Tambahan

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,70.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

Tabel 13.

Indeks pada indikator hadiah

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	2	2	4.55%	3.70

2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	1	2	2.27%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	5	15	11.36%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	36	144	81.82%	
Jumlah			44	163	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:

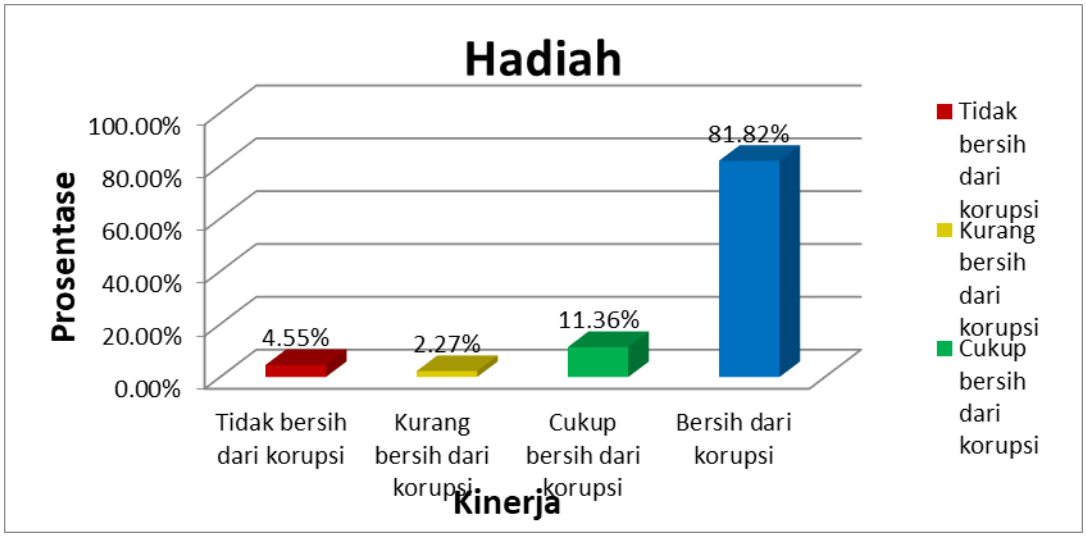

Gambar 3.2.6
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Hadiah

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,95.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja

pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

Tabel 14.

Indeks pada indikator transparansi biaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.95
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	2	6	4.55%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	42	168	95.45%	
Jumlah			44	174	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:

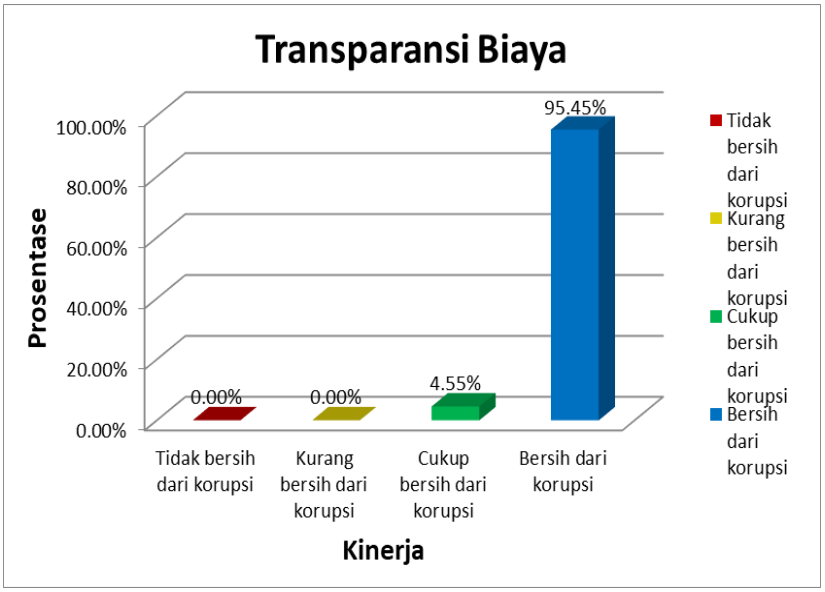

Gambar 3.2.7
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Transparansi Biaya

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,93.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

Tabel 15.

Indeks pada indikator percaloan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.93
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	3	9	6.82%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	41	164	93.18%	
Jumlah			44	173	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:

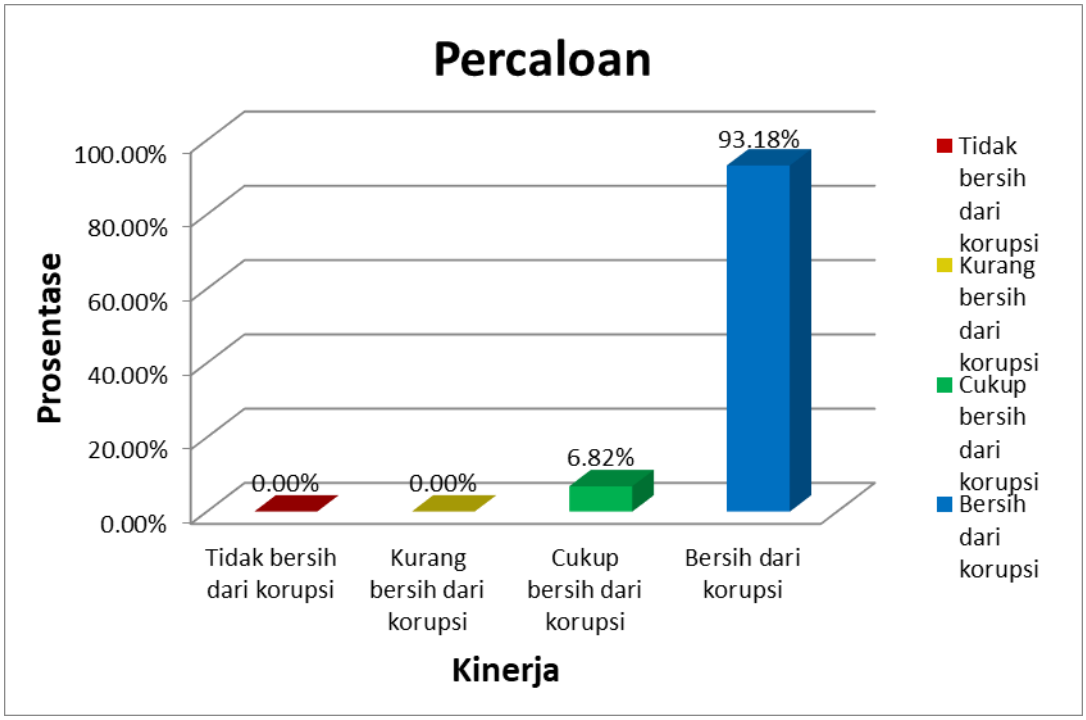

Gambar 3.2.8
Survey Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Percaloan

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,93.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari tindakan perbuatan curang.

Tabel 16.
Indeks pada indikator perbuatan curang

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.93

2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	3	9	6.82%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	41	164	93.18%	
Jumlah			44	173	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:

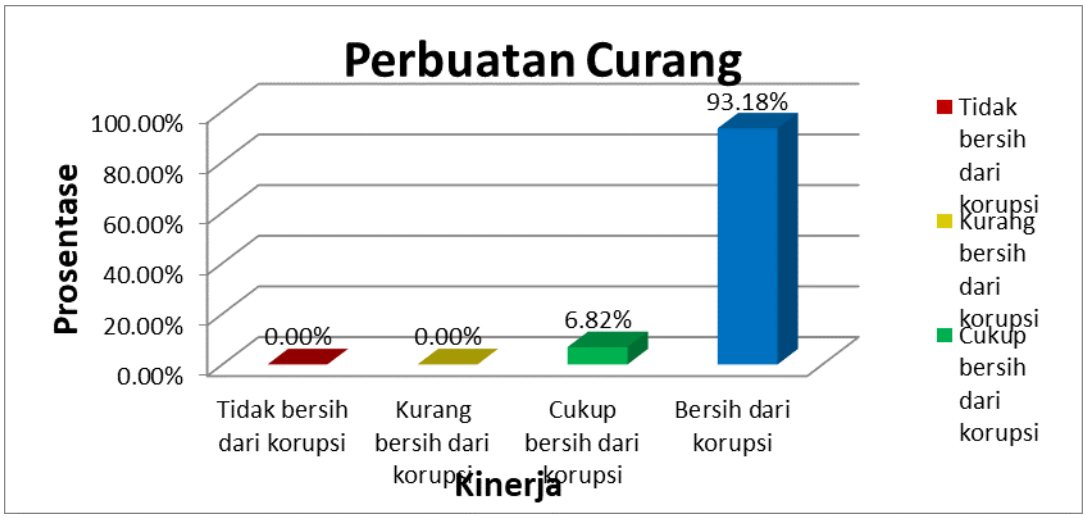

Gambar 3.2.9
Survey Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Perbuatan curang

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,95.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bebas dari transaksi rahasia.

Tabel 17.

Indeks pada indikator transaksi rahasia

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.95
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	2	6	4.55%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	42	168	95.45%	
Jumlah			44	174	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:

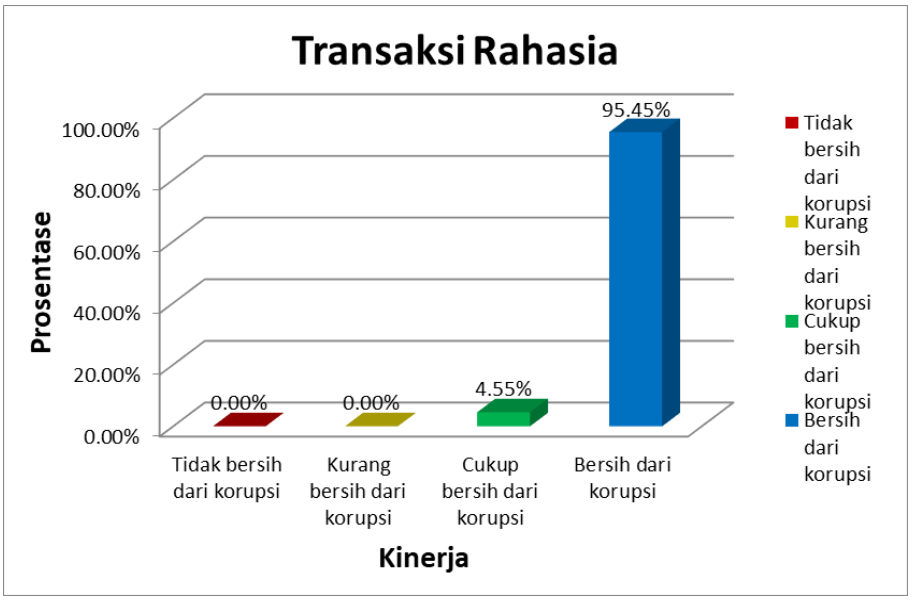

Gambar 3.2.10
Survey Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Transaksi Rahasia

3.3. Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebesar 3,90.

Tabel 18.
Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya

No	Unsur Pertanyaan	NRR
Q 1	Manipulasi Peraturan	4,00
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	3,93
Q 3	Menjual Pengaruh	3,91
Q 4	Transaksi Biaya	3,82
Q 5	Biaya Tambahan	3,84
Q 6	Hadiah	3,70
Q 7	Tranparansi Biaya	3,95
Q 8	Percaloan	3,93
Q 9	Perbuatan Curang	3,93
Q 10	Transaksi Rahasia	3,95
JUMLAH		**38,96**
NILAI RATA-RATA IPK		**3,90**

Keterangan :

Q1 - Q10	: Unsur-unsur Pertanyaan
NRR	**: Nilai Rata-rata**
IPAK	: Indeks Persepsi Anti Korupsi
*)	**: Jumlah NRR IPAK Tertimbang**
NRR Per Unsur	: Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi

IPAK : 3.90

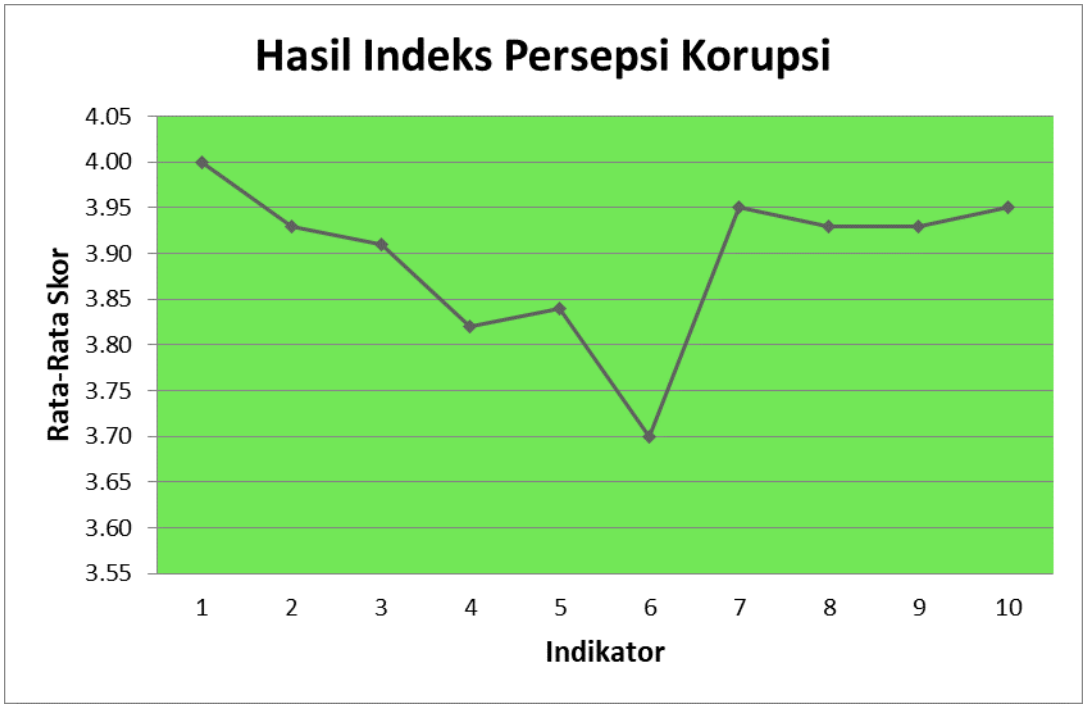

Gambar 3.3
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya

Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,26 – 100,00.

Tabel 19.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang

				bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya
1	Pelayanannya cepat dan mudah
2	Pelayanan sangat baik, maju terus PT Palangkaraya.
3	Petugas melayani sesuai dengan prosedur

4	Pelayanan yang diberikan sudah sangat baik, mohon untuk dipertahankan
5	PT Palangkaraya sudah menerapkan layanan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,90** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,93;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,91;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,82.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,84.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,70.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,95.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,93.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,93.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,95.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi.

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya yaitu 3,79.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto si SUPER Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

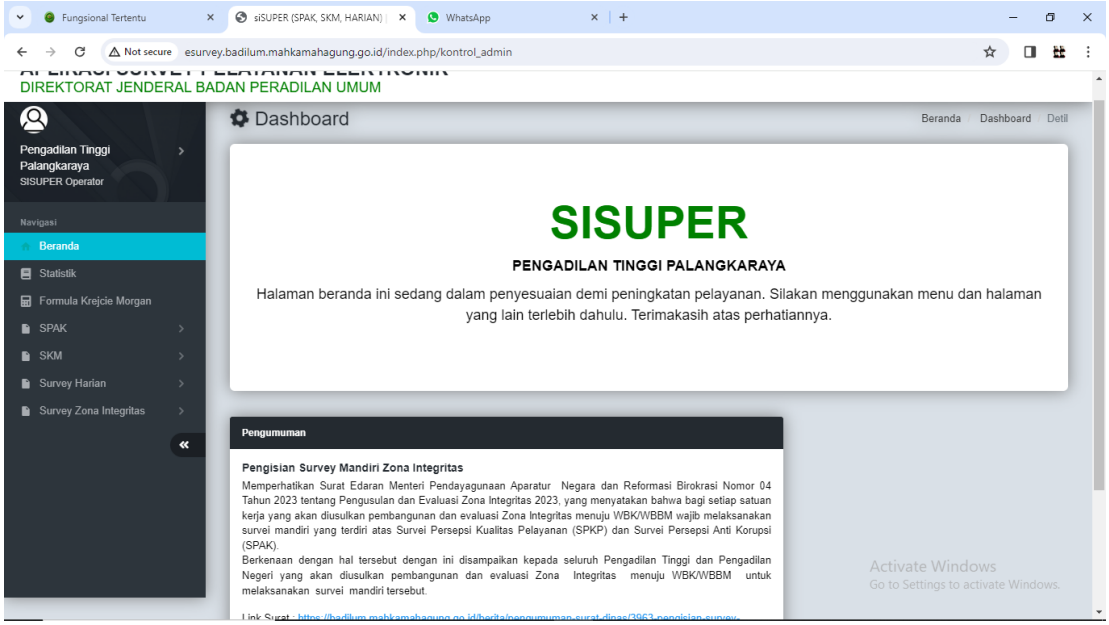

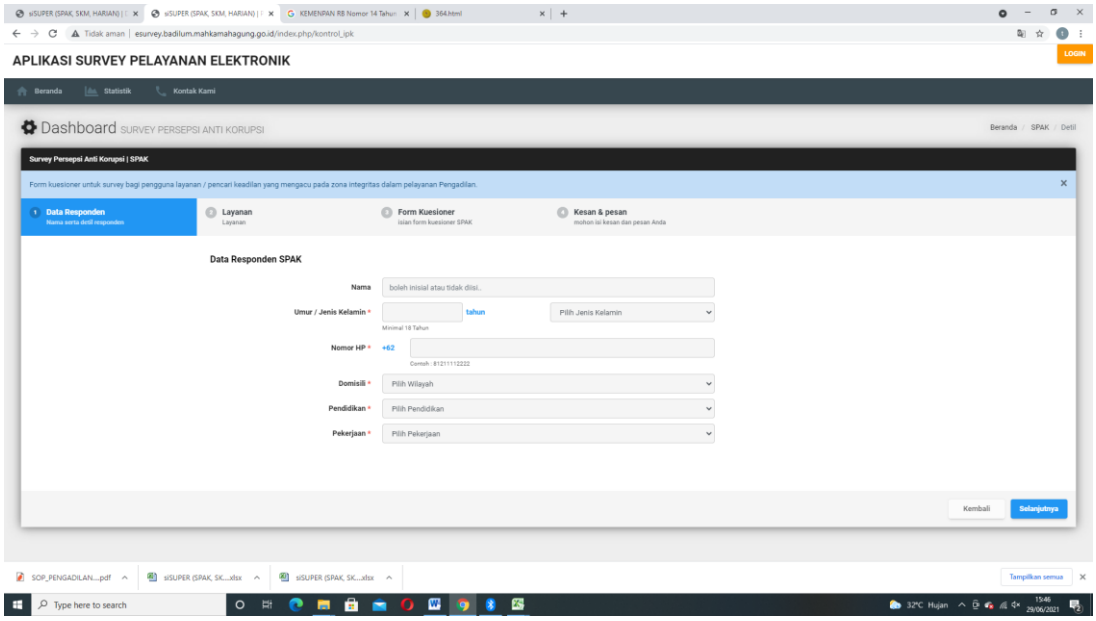

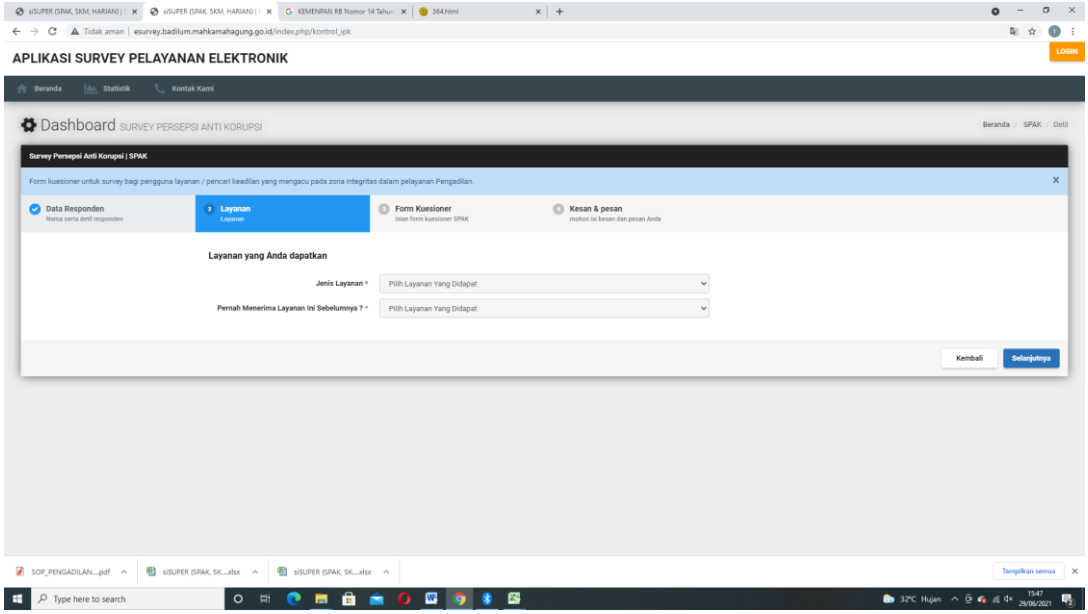
APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK
Data Responden
Layanan
Form Kuesioner
Kesan & pesan
Layanan yang Anda dapatkan
Jenis Layanan *
Pilih Layanan Yang Didapat
Pernah Menerima Layanan Ini Sebelumnya ? *
Pilih Layanan Yang Didapat
Kembali
Selanjutnya

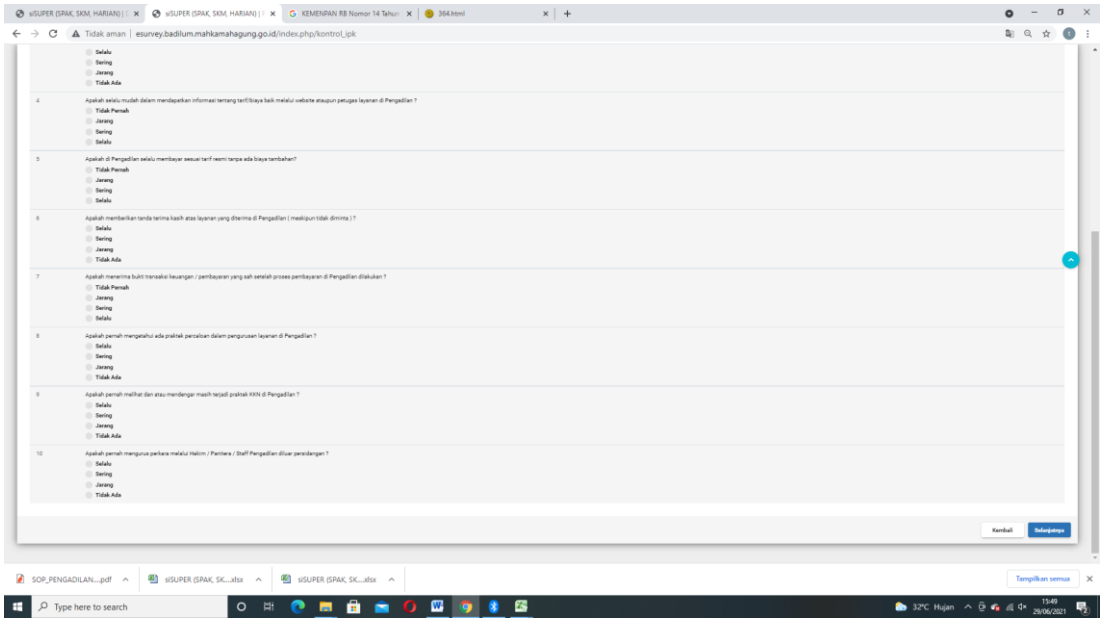

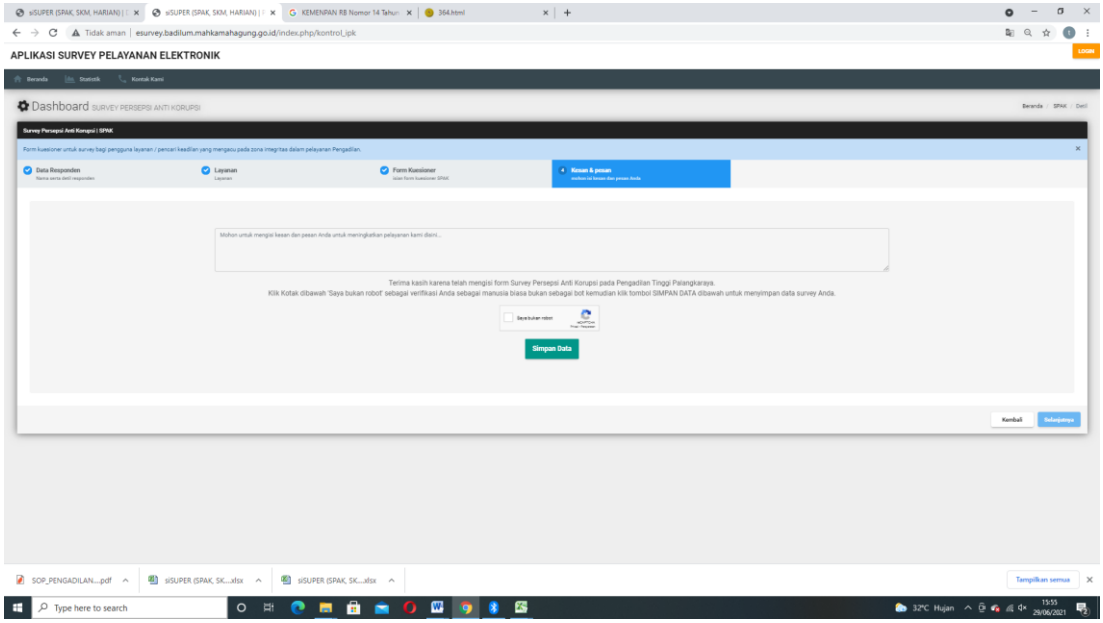
APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
Dashboard
Simpan Data

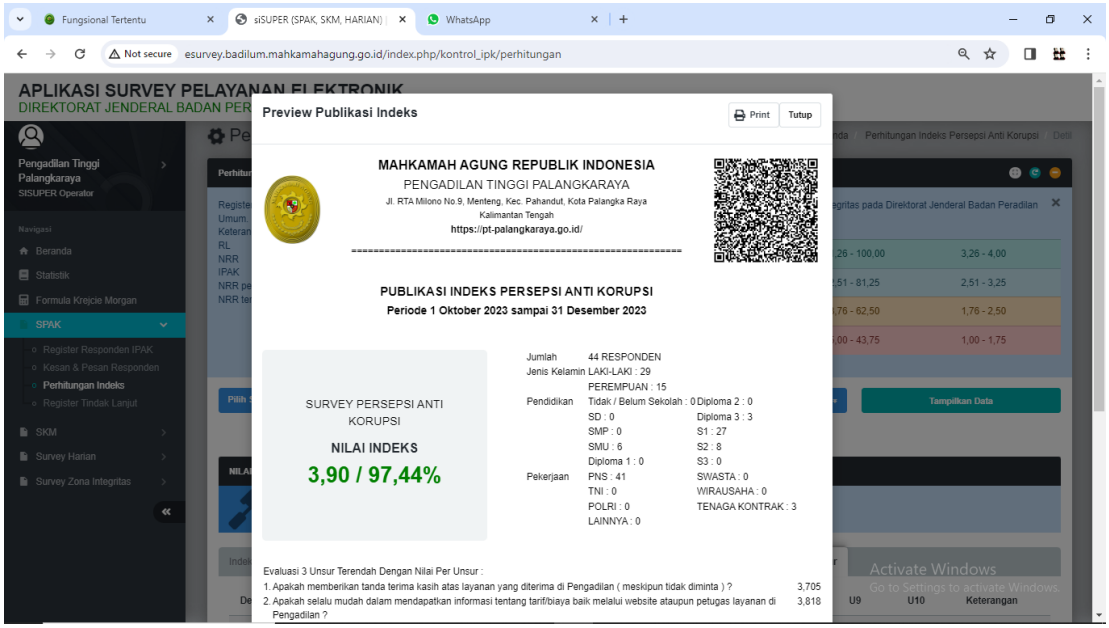
Preview Publikasi Indeks
Print
Tutup
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
Jl. RTA Milono No.9, Menteng, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya
Kalimantan Tengah
https://pt-palangkaraya.go.id/
PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Oktober 2023 sampai 31 Desember 2023
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
NILAI INDEKS
3,90 / 97,44%
Jumlah 44 RESPONDEN
Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 29
PEREMPUAN : 15
Pendidikan Tidak / Belum Sekolah : 0
SD : 0
SMP : 0
SMU : 6
Diploma 1 : 0
Diploma 2 : 0
Diploma 3 : 3
S1 : 27
S2 : 8
S3 : 0
Pekerjaan PNS : 41
TNI : 0
POLRI : 0
LAINNYA : 0
SWASTA : 0
WIRAUSAHA : 0
TENAGA KONTRAK : 3
Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :
1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ? 3,705
2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3,818

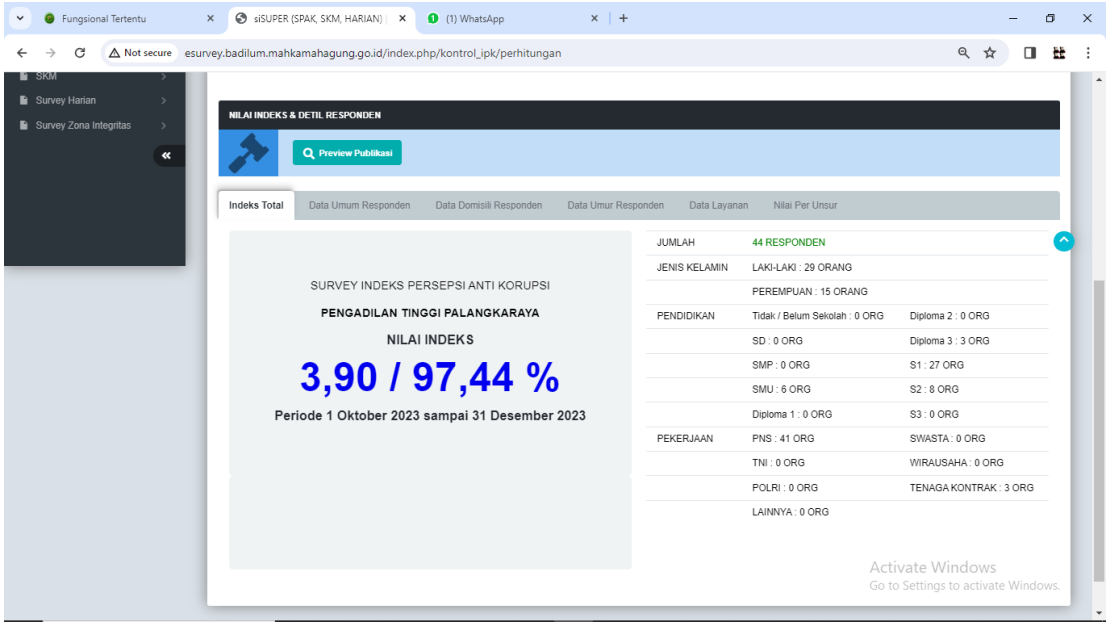
Fungsional Tertentu
siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN)
(1) WhatsApp
Not secure
esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk/perhitungan
SKM
Survey Harian
Survey Zona Integritas
NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN
Preview Publikasi
Indeks Total
Data Umum Responden
Data Domisili Responden
Data Umur Responden
Data Layanan
Nilai Per Unsur
SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
NILAI INDEKS
3,90 / 97,44 %
Periode 1 Oktober 2023 sampai 31 Desember 2023
JUMLAH 44 RESPONDEN
JENIS KELAMIN LAKI-LAKI : 29 ORANG
PEREMPUAN : 15 ORANG
PENDIDIKAN Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG Diploma 2 : 0 ORG
SD : 0 ORG Diploma 3 : 3 ORG
SMP : 0 ORG S1 : 27 ORG
SMU : 6 ORG S2 : 8 ORG
Diploma 1 : 0 ORG S3 : 0 ORG
PEKERJAAN PNS : 41 ORG SWASTA : 0 ORG
TNI : 0 ORG WIRAUSAHA : 0 ORG
POLRI : 0 ORG TENAGA KONTRAK : 3 ORG
LAINNYA : 0 ORG
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.